eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5(4) 1331 - 1338
ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EXTENDED DETERRENCE AMERIKA SERIKAT TERHADAP KONDISI STABILITAS KEAMANAN SEMENANJUNG KOREA

Selly Meilianawati[1]
Nim. 1102045159

Abstract

The United States and South Korea military alliance which is a manifestation of the implementation of the US Extended Deterrence policy has made the complexity of the Korean Peninsula region's security. This purpose of this study was to determine the effect of Extended Deterrence implementation policy of the United States on the stability of security condition of Korean Peninsula. This study used explanatory methods. In this study the authors use deterrence theory and concept of security dilemma which are used to perform the analysis in this study. Data analysis technique used qualitative analysis. The results show the military alliances between the United States and South Korea as a manifestation of the Extended Deterrence policy in order to protect the security of South Korea from the North Korean nuclear issue have affected the security conditions of the Korean Peninsula region by causing a security dilemma for the countries of the Korean Peninsula region internally consisting of Japan, China and North Korea without external influences covering countries outside the Korean peninsula. The countries of the external region of the Korean Peninsula only focus on North Korea's denuclearization efforts.

Keywords: *Extended Deterrence, Security Dilemma, Security Stability of Korean Peninsula*

Pendahuluan

Keadaan keamanan di Semenanjung Korea termasuk hal yang paling rentan di kawasan Asia Timur.Kawasan ini termasuk paling rentan dari segi keamananan dikarenakan posisi geografis menyebabkan Semenanjung Korea sepanjang sejarahnya mempunyai arti penting dari sudut strategis.Hal ini karena Semenanjung Korea terletak di antara negara-negara besar yaitu Jepang, Cina, dan Rusia. Sehingga Semenanjung Korea dilihat dari nilai strategis memiliki geopolitik, ekonomi dan militer, dengan indikasi kekuatan militer dari lima negara, di antaranya China, Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara, serta merupakan lintas perdagangan internasional terbesar dan juga sebagai lintas negara kapabel nuklir terbesar.

Secara historis terpecahnya Korea menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara diawali dari akhir Perang Dunia II, rivalitas Uni Soviet dan Amerika Serikat

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sellymeilianawt@yahoo.com

membelah Korea menjadi dua yang kemudian resmi membentuk Republik Korea dan Rakyat Demokratik Republik Korea Utara. Kedua Korea merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konflik ideologi Liberal-Demokratis dan Komunis-Sosialis antara Blok Barat(Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet). Kedua belah pihak saling mencari daerah pengaruh (enclave) untuk kepentingan strategis masing-masing, yang akhirnya mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di Semenanjung Korea khususnya dan Asia Timur pada umumnya.

Pada tanggal 25 Juni 1950, militer Korea Utara menyeberangi perbatasan dan melakukan invasi atas Korea Selatan yang kemudian meningkatkan ketegangan antar kedua Korea ini meningkat, perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun dan banyak memakan korban jiwa kemudian berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 yang ditandai dengan Korean War Armistice Agreement yang ditanda tangani oleh Amerika Serikat-PBB di satu pihak dan Cina-Korea Utara di pihak lainnya. Stueck (2010) melihat bahwa pecahnya perang Korea merupakan kegagalan deterrence Amerika Serikat yang pertama dalam menjaga stabilitas keamanan Korea Selatan.

Setelah dimulainya penandatanganan gencatan senjata tahun 1953, Amerika Serikat mempunyai pakta pertahanan dengan Korea Selatan yang pada umumnya negara besar seperti Amerika melihat Korea dari perspektif global dan regional mereka sehingga penting bagi Amerika Serikat untuk menjalin hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Penandatanganan Mutual Defense Treaty merupakan kebijakan Amerika Serikat sebagai perwujudan upaya pencegahan konflik senjata di Semenanjung Korea sesuai dengan komitmen dalam mempertahankan Balance of Power Asia Timur Soviet.

Pada tahun 1985, Korea Utara ikut serta dalam keanggotaan NPT (Nuclear Non-proliferation Treaty) yang bertujuan untuk denuklirisasi, tidak lama setelah bergabung dengan NPT, Korea Utara mulai menunjukkan keberatannya pada isi perjanjian. Melalui perjanjian tersebut Korea Utara tidak terima akan adanya pengawasan secara menyeluruh terhadap semua aktivitas nuklir yang akan dilakukan oleh NPT selama tujuh tahun, Pada tahun 1993, Korea Utara mengancam untuk keluar dari NPT dan menolak nuklir inspeksi dari IAEA (International Atom Energy Agency) karena adanya perselisihan antara IAEA dan Pyongyang. Semenjak Korea terbagi menjadi dua negara, Korea Utara menjadi negara yang mengisolasi negaranya sendiri sehingga hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan serta dunia luar sangat minim. Di sisi lain, Korea Utara terus melakukan program nuklir dan pengembangan kemampuan rudal dengan serangkaian uji coba yang mengakibatkan posisi Korea Utara semakin terkucilkan dalam interaksi Internasional.

Kawasan semenanjung Korea masih mengalami instabilitas politik hadirnya Amerika Serikat sebagai sekutu Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara merupakan alasan Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya, sehingga kepentingan Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir adalah untuk deterrent lawan-lawannya.

Melihat kondisi tersebut, Korea Selatan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan potensi dan kekuatan militernya dengan melakukan aliansi dengan Amerika Serikat melalui perjanjian kerjasama keamanan Amerika Serikat dan Korea Selatan yaitu Perjanjian Mutual Defense Treaty pada tahun 1953 yang merupakan simbol pertahanan dan keamanan sebagai dasar dari kebijakan Extended Deterrence yang ditujukan untuk permasalahan nuklir Korea Utara. Kebijakan Extended Deterrence bertujuan agar tidak terjadinya perang secara militer dengan skala besar di antara kedua negara Korea tersebut. Extended Deterrence merupakan suatu strategi defense persuasif yang bertujuan untuk mempertimbangkan posisi sekutu atau aliansi sebagai elemen penting kekuatan suatu negara untuk menundukkan negara lain agar tidak menyerang sekutu suatu negara. Substansi kebijakan Extended Deterrence yaitu meningkatkan pertahanan melalui aliansi militer antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan Korea Selatan dan kondisi keamanan di Semenanjung Korea dari ancaman senjata Nuklir oleh Korea Utara.Hal ini membuat Korea Utara sangat menuntut penarikan tentara Amerika Serikat dari Korea, karena Korea Utara menanggapi hal itu sebagai tindakan provokatif dari Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk menunjukan kekuatan pertahanan dan keamanan kedua negara sekutu tersebut dalam menjaga keamanan dari ancaman senjata nuklir Korea Utara.

Korea Selatan bukan berarti tidak bisa mengembangkan senjata nuklir pula. Namun, peranan Amerika Serikat di kawasan sebagai kekuatan penyeimbang utama balance of power dengan memberikan perlindungan nuklir bagi negara tersebut Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan demi mempertahankan status quo negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu Amerika Serikat juga mewujudkan langkah nyata memberikan perlindungan payung nuklir terhadap negara sekutunya dengan melakukan institusionalisasi payung nuklir dengan membentuk Extended Deterrence Policy Committee dengan melakukan koordinasi dengan NATO's Nuclear Planning Group. Penulis mengambil tahun batasan 2005-2009 dimana pada tahun-tahun tersebut Korea Utara mengumumkan secara resmi kepemilikan senjata nuklir dan melakukan uji coba nuklir dalam kurun tahun tersebut sehingga Amerika Serikat dan Korea Selatan memutuskan untuk melakukan aliansi militer.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Deterrence

Deterrence dan *defense* lebih fokus kepada kemampuan militer.Konsep *deterrence* secara umum adalah strategi defensif yang dikembangkan setelah Perang Dunia I dan digunakan selama Perang Dingin.Hal ini terutama relevan berkaitan dengan penggunaan senjata nuklir, dan juga terkait dengan *War on Terrorism*.*Deterrence* merupakan salah satu upaya pencapaian stabilitas internasional dan perdamaian dunia dengan melakukan upaya pertahanan tanpa melakukan aksi militer atau peperangan.

Konsep ini banyak diterapkanpada saat Perang Dingin dan menjadi suatu cara yang dapat ditempuh dalam usaha suatu negara untuk menghindari peperangan sekaligus memberikan penangkalan terhadap pihak lawan. Konsep ini erat kaitannya dengan kemunculan pola bipolar dalam sistem internasional.konsep*deterrence* harus diterapkan dalam situasi dan kondisi yang damai, walaupun damai yang semu. Hal tersebut dimaksudkan agar pihak lain tersebut tidak merasa tertantang dan sebagai

akibatnya justru menantang balik.Sarana yang dipergunakan untuk menjalankan kebijakan deterrence bisa berupa penggunaan senjata pemusnah massal (WMDs), kekuatan senjata konvensional, peningkatan kapabilitas militer secara umum, membentuk aliansi,sanksi ekonomi atau embargo, dan ancaman melakukan pembalasan. Adapun konsep *deterrence* terbagi menjadi dua jenis yaitu: ***Primary Deterrence***, mencegah agar potensial agresor tidak menyerang negara *deterrer*, atau mencegah negara sendiri agar tidak diserang oleh potensial agresor.***Extended Deterrence***, tidak hanya mencegah agar negara sendiri tidak diserang tetapi juga mencegah agar potensial agresor tidakmenyerang negara-negara sekutu, anggota aliansi atau negara-negara dibawah pengaruh *deterrer*.

Konsep Security Dilemma

Security dilemma dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara. Tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berakibat atau dianggap melemahkan keamanan negara lainnya.[2] Sebaliknya reaksi dari negara terakhir terhadap tindakan negara pertama tersebut akan direspon dengan cara yang sama oleh negara pertama tadi, dan seterusnya. Sehingga masing-masing negara akan mengeluarkan anggaran belanja pertahanan yang terus makin membesar dan ini berarti bahwa mereka tidak semakin aman, tetapi justru semakin mendekati ambang perang yang dapat menyebabkan situasi semakin berbahaya.[3]

Ketika suatu negara berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya melalui pembangunan kekuatan persenjataan, maka akan terjadi suatu keadaan dimana kadang – kadang tindakan negara tersebut,setidak – tidaknya dipandang oleh negara-negara lain, membangun kekuatan persenjataannya melebihi yang diperlukannya untuk sekedar keperluan pertahanan, bahkan sampai pada titik memiliki kekuatan ofensif. Dipandang terlalu sedikit karena apa yang dilakukan oleh negara pertama tersebut akan direspon oleh negara-negara lain dengan cara meningkatkan persenjataan mereka pula sehingga pada akhirnya justru akan mengurangi keamanan negara pertama tersebut.[4]Selanjutnya, karena negara pertama akan merasa keamanannya terganggu oleh pembangunan kekuatan negara-negara lain tersebut, maka ia akan kembali meningkatkan pembangunan kekuatannya. Begitulah seterusnya, sehingga proses aksi dan rekasi ini akan terus berlangsung membentuk suatu lingkaran yang tidak ada ujungnya. Kesiagaan defensive salah satu pihak dianggap bukti motif ofensif oleh pihak lain, yang selanjutnya mempersenjatai diri sebagai tanggapannya. Semua pihak berusaha untuk saling mengungguli sehingga menumbuhkan perlombaan senjata dan pasukan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.Perlombaan ini menciptakan dilemma keamanan.

---

[2] Robert Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma" dalam Richard K. Betts, Conflict After the Cold Arguments on Cause of War and Peace. Mac Millan Publishing Company, New York, 1994, hal. 315

[3] Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Usana, Surabaya, hal 69-70

[4] Richard Little and Michael Smith, "Perspective on World Politics" dalam Dafri Agus Salim, *op.ct,* hal. 11

Hasil Penelitian

Didalam sistem internasional yang anarkis stabilitas akan dicapai melalui perimbangan kekuasaan (Balance of Power). Perimbangan ini bersifat dinamis yaitu, setiap saat dapat berubah sejalan dengan perubahan-perubahan yang berkembang, baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun pada akhirnya perimbangan baru akan tercipta, baik melalui jalur damai ataupun kekerasan (perang). Akan ada negara yang ingin mempertahankan kondisi Balance of Power yang dikenal dengan sebutan "status quo state" yang artinya merupakan kondisi keamanan suatu negara yang tetap sebagaimana keadaan sebelumnya.Jika melihat kondisi keamanan di antara dua negara Korea secara historis dengan adanya perang saudara yang terjadi dan diakhiri dengan gencatan senjata membuat kedua negara Korea tersebut dalam kondisi damai yang semu, kondisi damai yang sekiranya dapat berubah kapan saja menjadi ancaman bagi kedua negara Korea tersebut yang dapat berdampak secara langsung terhadap kawasan Semenanjung Korea kemudian konflik berkepanjangan antara negara-negara kawasan Semenanjung Korea juga mempengaruhi stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Status quo yang dihadapi Korea Utara dan Korea Selatan, pihak Korea Utara memutuskan mengembangakn nuklir sebagai alat pertahanan keamanan negaranya dan terus meningkatkan kekuatan militernya. Menanggapi sikap provokatif Korea Utara, Korea Selatan melakukan aliansi pertahanan dengan Amerika Serikat dalam melindungi keamanan negara sekutunya yang merupakan perwujudan dari *Extended Deterrence*Berkaitan dengan adanya pengembangan nuklir Korea Utara membuat pihak Amerika Serikat turun tangan dalam melindungi negara aliansinya yaitu Korea Selatan dengan kerjasama pertahanan melalui peningkatan kapabilitas militer dan dengan melakukan aliansi militer yang meliputi:

1. Berdasarkan data Global Security latihan militer gabungan Amerika Serikat-Korea Selatan dimulai sejak tahun 2001 sampai tahun 2007 disekitar perbatasan dan latihan perang gabungan antar Amerika Serikat dan Korea Selatan.
2. Bantuan militer Amerika Serikat dan peningkatan militer Korea Selatan selain penempatan personel militer Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan, pihak Amerika Serikat juga memberikan bantuan kendaraan-kendaraan militer khususnya kendaraan militer Angkatan Darat (*Army*), Angkatan Laut (*Navy*), dan Angkatan Udara (*Air Force*) seperti yang telah dicantumkan pada ***tabel 3.1***.Kemudian hal ini dapat menggeser status "quo' dikawasan Semenanjung Korea yang kemudian hal ini mempengaruhi stabilitas kemanan di kawasan Semenanjung Korea secara **internal**. Jepang, mempertahankan pendirian militer hanyalah satu metode terbaik untuk mencapai keamanan nasional.

Diplomasi, bantuan ekonomi dan pembangunan, serta hubungan yang erat dengan Amerika Serikat di bawah persyaratan perjanjian keamanan 1960 dianggap lebih penting.Jepang menjaga pengeluaran militer hanya sebesar 1% dari GDP, meski ini masih sangat signifikan.Sikap Jepang itu bersifat defensif, tanpa senjata pemusnah massal, tidak ada bom jarak jauh, tidak ada rudal jarak menengah atau jauh, tidak ada kapal induk dan tidak ada kapal selam nuklir.Tapi Jepang memiliki senjata konvensional yang cukup besar, dan ingin menggunakan *Self- Defense Force* untuk operasi penjaga perdamaian.Jepang melakukan penelitian sistem pertahanan nuklir regional dan mengubah kebijakan pertahanan negaranya.anggaran militer China pada tahun 2005 akan naik 12,6 persen menjadi 247,7 miliar yuan ($ 29,9 miliar).

Cina telah mengumumkan peningkatan dua digit dalam pengeluaran militer hampir setiap tahun selama lebih dari satu dekade.Pada bulan Maret 2006 pemerintah China mengumumkan anggaran pertahanan resmi sekitar $ 35 miliar untuk tahun 2006, meningkat hampir 15 persen dari tahun sebelumnya. Pada bulan Maret 2007, China mengumumkan bahwa mereka akan meningkatkan anggaran pertahanan tahunannya sebesar 17,8% dari tahun sebelumnya, menjadi $ 45 miliar. Sepanjang tahun 2003-2007 Cina memiliki anggaran pembelanjaan yang paling tinggi. Pada bulan Maret 2008, Dewan Negara China mengajukan sebuah proposal ke sebuah sidang Kongres Rakyat Nasional untuk mempertimbangkan persetujuan sebesar 417,8 miliar yuan atau sekitar US $ 57,22 miliar untuk pengeluaran pertahanan negara tersebut pada tahun 2008. Cina mengumumkan kenaikan pembelanjaan militer yang hampir 15 persen pada tanggal 04 Maret 2009.Cina menjadi angkatan bersenjata yang mampu untuk terlibat dalam perang berteknologi tinggi dan mampu membangun kekuatan secara global pada tahun 2050.Korea Utara, Adanya embargo ekonomi terhadap Korea Utara oleh Amerika Serikat dan negara-negara kawasan yang sempat membuat pihak Korea Utara merasa terancam dari segi ekonomi, menyebabkan Korea Utara melakukan perlawanan terhadap sanski yang diberikan terhadap negaranya. Pada tahun 2005 Korea Utara mengumumkan secara resmi kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan hadir dalam pertemuan Six Party Talks tanpa batas waktu yang ditentukan , hal ini telah membuat membuat keamanan semakin kompleks, negara-negara kawasan tersebut berlomba untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya total pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan adalah US $10,1 miliar. Sumber lain (Bill Gertz, *"Korea Utara Pumps Money into Military*," Washington Times, 3 Agustus 2004) mengklaim bahwa Korea Utara dapat mengeluarkan anggaran militer sebanyak 40 persen GDP.

Sementara pengaruh secara **eksternal** Semenanjung Korea yang meliputi negara-negara diluar kawasan Semenanjung Korea hanya berfokus terhadap isu nuklir dimana pihak Korea Utara masih mengembangkan nuklir dan melakukan serangkaian uji coba nuklir hal ini mendapat respon dari dunia internasional yang menilai bahwa hal ini dapat mengancam stabilitas kawasan maupun internasional sejak Korea Utara keluar dari NPT dan menolak untuk mengungkapkan rincian perkembangan nuklir pada IAEA kemudian Korea Utara melakukan Uji coba nuklir pada tahun 2006 yang telah mengundang berbagai respon dari dunia internasional karena nuklir Korea Utara dapat mengancam keamanan kawasan dan selain itu Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan Cina, Perancis, Rusia, Inggis, dan Amerika Serikat sebagai anggota tetap DK PBB.Aksi nuklir Korea Utara tersebut membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1718 sebagai sanksi terhadap Korea Utara.Aksi dan reaksi yang dilakukan negara-negara kawasan internal Semenanjung Korea tersebut merupakan suatu upaya pertahanan dan melindungi kepentingan nasionalnya dimana negara-negara kawasan Semenanjung Korea telah sepakat untuk mempertahankan keamanan dikawasan sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dengan menjaga "*status quo*" kawasan tersebut, karena yang dikhawatirkan adalah ketika semua negara kawasan meningkatkan militernya yang kemudian menimbulkan rasa *insecure* maka dapat berujung terhadap perlombaan senjata antar negara kawasan dan berdampak negatif terhadap ekonomi negara-negara kawasan.Negara harus memiliki sarana kekuatan seperti militer, persenjataan, sebagai bukti bahwa negara itu kuat, dan juga sebagai alat pertahanan jika ada ancaman atau serangan dari negara lain. Menurut Barry R.

Posen, kondisi anarki tersebut membuat keamanan adalah first concern bagi suatu negara. Dengan adanya kekuatan ini, yang mana tujuan utama dari negara dengan keberadaan kekuatan tersebut, yaitu untuk menjaga keamanan dan mempertahankan diri, disisi lain hal ini juga akan memicu rasa khawatir negara lain yang nantinya negara tersebut akan memperkuat militernya.

Referensi

Buku

Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara terhadap kompleksitas keamanan regional Asia Timur.pdf, Alfina Farmarita Wicahyani, FISIP, UI, 2010

Fukuyama & Oh,1993. *"The U.S-Japan Security Relationship After Coldwar",* hal 26

Robert Jervis, "Cooperation Under the Security Dilemma" dalam Richard K. Betts, ConflictAfter the Cold Arguments on Cause of War and Peace. Mac Millan Publishing Company, New York, 1994, hal. 315

Ralph A. Cossa & Brad Glosserman, 2011. "Extended Deterrence and Disarmament Japan and the New US Nuclear, the Posture" , dalam The Nonproliferation Review, Vol 18, no.1.

Andrew O'Neill,2011. "Extended Nuclear Deterrence in East Asia: redundant or resuregent" (Online library) http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20Affairs/2011/876oneill.pdf.

Amien Rais, Politik Internasional Dewasa Ini, Usana, Surabaya, hal 69-70

Richard Little and Michael Smith, "Perspective on World Politics" dalam Dafri Agus Salim,op.ct, hal. 11

Yang Seung -Yoon, dan Mohtar Mas'oed,Masyarakat, Politik, dan PemerintahanKorea : Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, hal. 1

Joni Emirzon, Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000. Hal 72

Yang Seung-Yoon dan Aini Setiawati,sejarah Korea Awal Abad Hingga MasaKontemporer, Ghajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003, hal. 190.

Internet

http://iisip.ac.id/sites/default/files/IRMAWAN_JUMAT.swf "Kebijakan Extended Deterrence Amerika Serikat dalam Konflik Dua Korea" (diakses pada tanggal 17 Juni 2016)

http://www.globalsecurity.org(diakses pada tanggal 20 Oktoberr 2016)

http://www.globalsecurity.org/military/world/China/budget.htm(diakses pada tanggal 6 Juli 2017)

http://www.globalsecurity.org/military/world/dprk/budget.htm (diakses pada tanggal 5 Juli 2017)

http://www.globalsecurity.org/military/world/japan/budget.htm (diakses pada tanggal 6 Juli 2017)

http://www.globalsecurity.org/military/world/rok/budget.htm (diakses pada tanggal 5 Juli 2017)

https://www.konfrontasi.com/content/opini/rivalitas-korea-utara-vs-selatan (diakses pada tanggal 6 Juli 2017)

Kronologi program nuklir Korea Utara, http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm, (diakses pada tanggal 27 Maret 2016)

www.fkpmaritim.org, Forum Kajian Pertahanan Dan Maritim (diakses pada tanggal 20 mei 2016)